



# Tak Ada Hal Tertentu

■ Wako Tampik Isu Permainan Pemecahan Proyek di Dinas Cipta Karya ■ Tuding Warga Menjadi Penyebab Banjir di Pekanbaru



“ Lihat saja. Masih ada warga yang membuang sampah ke sungai, anak sungai dan drainase. Ketika hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik dan akhirnya meluap ”

**FIRDAUS**  
Walikota Pekanbaru

PEKANBARU, TRIBUN - Baru-baru ini terungkap adanya pekerjaan dengan nilai total Rp 83 miliar di Dinas Cipta Karya dan Pemukiman yang dipecah menjadi 696 paket dan memakai sistem pengadaan langsung (PL). Tapi Walikota Pekanbaru, Firdaus menampik adanya "hal-hal tertentu" yang mendasari sistem PL tersebut.

Ketika ditanyai Tribun, Minggu (5/10), Walikota mengatakan sistem PL dilakukan untuk proyek senilai Rp 83 miliar itu bukan dilandasi hal-hal tertentu. Tanpa menjelaskan apa makna kalimat hal-hal tertentu tersebut, dia menekankan bahwa proyek PL itu merupakan hasil dari penyerapan aspirasi warga.

Diberitakan sebelumnya, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan dengan total anggaran Rp 83 miliar lebih di APBD tahun 2014. Anehnya, pekerjaan tersebut dipecah menjadi pekerjaan kecil dengan nilai di bawah Rp 200 juta. Bahkan ada yang hanya puluhan juta.

Peneliti Fitra Riau Triono Hadi mengenai hal ini sebelumnya mengatakan langkah yang diambil pemerintahan Firdaus itu sangat rawan terjadinya korupsi dan penyelewengan.

Plt Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan

■ Bersambung ke Hal 23



## Tak Ada

Sambungan Hal. 13

Cipta Karya Pekanbaru Dedi Gusriadi enggan memberikan keterangan mengenai pemecahan proyek tersebut. "Ttu masalah sesitif," katanya akhir pekan lalu.

Sementara itu, masih terkait dengan layanan sarana dan prasarana lingkungan warga, Firdaus menudin warga menjadi penyebab terjadinya banjir di Pekanbaru selama ini. Firdaus menilai banyak perbuatan warga yang membuat fungsi sungai, anak sungai sampai drainase tak maksimal dan menimbulkan banjir.

"Kita lihat saja. Masih ada warga yang membuang sampah ke sungai, anak sungai dan drainase. Ketika hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik dan akhirnya meluap," ujar Walikota, Minggu (5/10).

Tak hanya itu, drainase juga banyak yang terganggu dengan dibangunnya jembatan semi permanen dan permanen oleh pemilik toko di sejumlah ruas jalan. Alasannya jembatan tersebut sebagai akses masuk menuju toko.

Namun, tiang penyangga jembatan kerap dipancang pada drainase. Alhasil, ketika hujan turun, sampah tersangkut di tiang dan akhirnya menyumbat jalannya air. "Akhirnya meluap lagi," katanya. Kondisi ini pernah Walikota lihat di Jalan Garuda Sakti Panam.

Melihat fenomena ini, Firdaus mengingatkan bahwa masyarakat punya andil besar dalam mencegah banjir. Kalau masing-masing warga sudah disiplin menjaga lingkungan, otomatis masalah banjir dapat teratasi. "Jangan hanya menuntut pemerintah saja. Tapi harus sama-sama menjaga. Karena ini sebenarnya merupakan tugas bersama," ungkap Walikota.

Terkait mulai tingginya curah hujan beberapa hari terakhir, dia mengingatkan seluruh warga Pekanbaru dan dinas terkait untuk menjaga kedisiplinan. Terutama terkait membuang dan mengelola sampah.

Warga diminta proaktif menjaga ling-

kungannya. Dimulai dari yang paling kecil seperti pekarangan rumah serta parit di sekitar RT atau RW. Jaga juga anak sungai agar tidak sampai mampet.

"Kalau ada anak sungai yang membuat normalisasi dengan alat berat, warga bisa pinjam peralatan ke Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Kami akan segera kirim dan bantu mengatasinya," ujar Walikota.

Terkait pengajuan alat berat itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pekanbaru, Azmi menyarankan warga menyampaikannya lewat dua cara. Bisa lewat SMS center Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di nomor 08238888600. Atau melalui website [www.jalanpekanbaru.com](http://www.jalanpekanbaru.com).

Ditanya apakah laporan warga langsung ditanggapi, Azmi tak berani membenarkan. Karena penggunaan alat berat itu diprioritaskan kepada laporan yang lebih dulu masuk. "Jadi laporan mana yang duluan masuk itulah yang kami layani lebih awal," katanya.

Dalam menangani suatu masalah, Azmi juga tidak bisa mematok waktunya. Karena ada yang bisa diatasi dalam waktu singkat. Ada pula yang sampai seminggu. Untuk itu, tentu warga harus mengantre untuk dapat pelayanan.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa saat ini dinas yang dipimpinnya tengah melakukan normalisasi Sungai Sail. "Alat kita sedang berada di Sungai Sail yang pengerjaannya diperkirakan berjalan tiga bulan," tutur Azmi.

Saat ini proses normalisasi telah berjalan dua bulan. Artinya sebulan lagi diperkirakan selesai. Selanjutnya sasaran Bina Marga adalah anak sungai. Seperti di Jalan Datuk Setia Maharaja dan Jalan Sudirman.

Dengan normalisasi ini diyakini air di titik genangan akan cepat masuk ke sungai induk. Masa air tergenang akan lebih singkat. Tentunya jika warga juga proaktif memberikan drainase.

Azmi juga mengingatkan bahwa penanganan banjir tak hanya menjadi beban Pemko. Tapi juga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Artinya, ketiga instansi punya tanggungjawab yang sama dalam mengatasi masalah banjir.

### Dibujuk

Firdaus ternyata pernah dibujuk agar mau mengeluarkan izin yang belum lengkap persyaratannya? Ya, hal itu memang pernah terjadi dan diakui oleh Walikota.

Kepada Tribun yang menanyainya, Minggu (5/10), Firdaus mengaku banyak orang yang datang padanya meminta izin tertentu dikeluarkan. "Mereka minta saya membuat memo kepada kepala dinas untuk mengeluarkan izin. Cara ini saya tolak karena sudah pasti proses pengurusan izin yang bersangkutan bermasalah," kata Walikota.

Dia mencontohkan ada orang yang minta agar izin membangun rumah toko (ruko) segera diterbitkan. Ternyata, orang tersebut belum memenuhi syarat mendirikan ruko yaitu harus ada sumur resapan. "Ya akhirnya saya tolak. Karena kalau saya setuju sama saja menyuruh saya melanggar aturan," ungkapny.

Diterangkan Firdaus, dalam memberikan perizinan sudah diisyaratkan agar pemilik memenuhi Perda sumur resapan. Sumur resapan bisa dibuat di samping, depan atau belakang bangunan. Hal itu penting agar air dari hujan cepat meresap ke tanah. Sehingga tidak menimbulkan genangan atau banjir.

Di jalan utama, bangunan juga mesti memenuhi aturan terkait Garis Sempadan Bangunan (GSB). Tapi sekarang masyarakat banyak yang tidak disiplin. GSB berusaha dilanggar. Ruang terbuka hijau yang mestinya ditanami tumbuhan justru disemen. Ini yang membuat air tak terserap ke tanah.

Sayangnya, meski Pemko sudah tegas, teguran kerap tak diindahkan. Alhasil, Pemko terpaksa bertindak lebih tegas dengan melibatkan Tim Yustisi. (hes)